

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU
(ASI) EKSLUSIF SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS
KESEHATAN DI PT SARI TEMBAKAU HARUM, KENDAL**



Monika Rizki
22.C2.0105

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU
(ASI) EKSLUSIF SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS
KESEHATAN DI PT SARI TEMBAKAU HARUM, KENDAL**
TESIS

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar (Magister)



ABSTRAK

Prevalensi stunting masih tinggi, salah satunya karena pemberian ASI eksklusif belum optimal. Cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Kendal masih di bawah target yaitu 63%, khususnya pada ibu bekerja yang menghadapi hambatan struktural, sosial, dan minimnya dukungan lingkungan kerja. Rendahnya kesadaran serta lemahnya implementasi kebijakan turut menghambat pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tiga masalah yaitu kebijakan pemberian ASI eksklusif, pelaksanaan kebijakan, dan faktor penghambat penerapan kebijakan pemberian ASI eksklusif di PT Sari Tembakau Harum .

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitik melalui wawancara, studi kepustakaan, serta analisis regulasi seperti UU Ketenagakerjaan, UU Kesehatan, PP No. 33 Tahun 2012, dan Perda Kabupaten Kendal No. 3 Tahun 2019. Responden utama adalah pekerja perempuan menyusui eksklusif, dengan informan dari pihak perusahaan dan instansi kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sari Tembakau Harum telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur dan menyediakan ruang laktasi sebagai bentuk kepatuhan normatif terhadap regulasi nasional, namun pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran pekerja, budaya kerja berbasis target produksi, serta keterbatasan fleksibilitas waktu. Keberhasilan kebijakan tidak cukup ditentukan oleh regulasi dan fasilitas, tetapi juga memerlukan komitmen manajerial, edukasi berkelanjutan, dan perubahan budaya organisasi. Dengan demikian, kebijakan ASI eksklusif di perusahaan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi harus diwujudkan secara substantif sebagai perlindungan hak anak dan pekerja perempuan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Hak Kesehatan Anak, Kebijakan Perusahaan

ABSTRACT

The prevalence of stunting remains high, partly due to suboptimal exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding coverage in Kendal Regency remains below target at 63%, particularly among working mothers who face structural and social barriers, as well as minimal work environment support. Low awareness and weak policy implementation also hinder the fulfillment of children's rights to nutrition and health. In this regard, this study examines three issues the exclusive breastfeeding policy, its implementation, and factors inhibiting its implementation at PT Sari Tembakau Harum.

The research employed a socio-legal approach with a descriptive-analytic method, using interviews, literature studies, and analysis of relevant regulations such as the Manpower Law, the Health Law, Government Regulation No. 33 of 2012, and Kendal Regency Regional Regulation No. 3 of 2019. The main respondents were breastfeeding exclusive female workers, supported by informants from the company and health institutions.

The findings reveal that PT Sari Tembakau Harum has issued a Director's Decree and provided lactation rooms as a form of normative compliance with national regulations, nevertheless the implementation remains suboptimal due to workers' low awareness, a production target-oriented work culture, and limited time flexibility. The success of the policy is not solely determined by regulations and facilities, but also requires strong managerial commitment, continuous education, and cultural change within the organization. Therefore, exclusive breastfeeding policies in the workplace should not remain a formal obligation but must be realized substantively as a form of sustainable protection for the rights of children and female workers

Keywords: Exclusive Breastfeeding, Child Health Rights, Company Policy